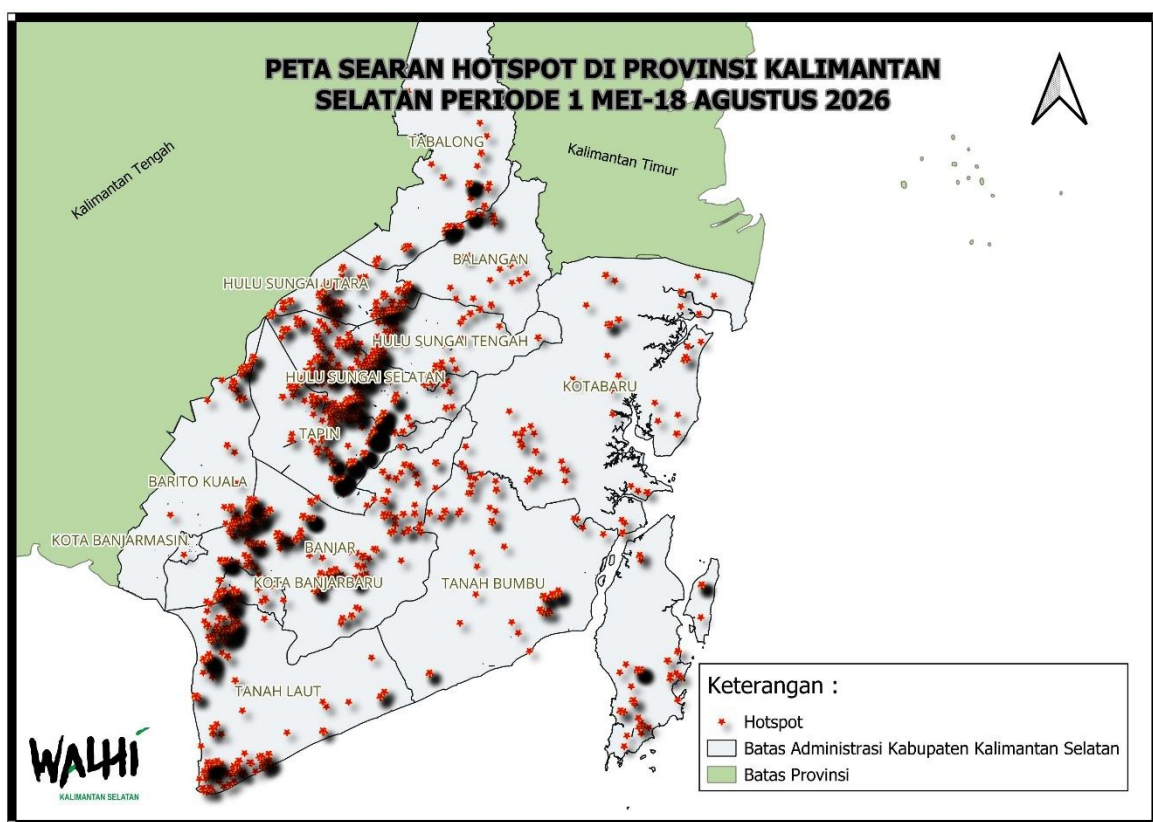


Lingkaran Setan Bencana: Karhutla dan Kabut Asap yang Terus Berulang di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan kembali diselimuti kabut asap. Bagi masyarakat di provinsi ini, pemandangan langit yang berkabut pekat setiap musim kemarau bukan lagi hal asing, ia telah menjadi semacam "kalender bencana" yang datang silih berganti dengan banjir di musim hujan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun ini kembali menegaskan satu hal: bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan akumulasi dari tata kelola lingkungan yang buruk dan serampangan.

Data dan Analisis Sebaran Karhutla



Peta Sebaran Hotspot di Provinsi Kalimantan Selatan periode 1 Mei - 18 Agustus 2026. WALHI Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemantauan titik panas (hotspot) menggunakan citra satelit VIIS NOAA-21 pada periode 1 Mei 2026 hingga 18 Agustus 2026, WALHI Kalsel menemukan

sebanyak 3.219 hotspot yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, lima kabupaten penyumbang titik hotspot terbanyak yakni Tapin 996 hotspot, Hulu Sungai Selatan 517 hotspot, Banjar 412 hotspot, Tanah laut 394 hotspot dan Tabalong 230 hotspot.

Dari data BPBD Kalsel tercatat luas lahan terbakar mencapai 6.029,67 hektar di Kalsel per 18 Agustus 2026. Kemudian, Mengutip Sipongi+ Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan Republik Indonesia per 21 Agustus, seluas 8.019,63 hektar hutan dan lahan telah terbakar di Kalimantan Selatan.

Dari lima kabupaten penyumbang hotspot terbanyak, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Tabalong yang merupakan kabupaten dengan luas Fungsi Ekosistem gambut (FEG) terbesar di Kalimantan Selatan. Tapin bahkan menempati posisi ganda yang mencolok: kabupaten dengan hotspot tertinggi (996 titik) sekaligus pemilik kawasan gambut terluas (82.113 hektare). Pola ini memperkuat dugaan bahwa kebakaran bukan semata soal cuaca kering, melainkan konsekuensi dari lahan gambut yang telah terdegradasi, kering, rentan terbakar, dan sulit dipadamkan begitu api menyala.

Korporasi Diduga Penyumbang Asap

Dari 3.219 hotspot di Kalimantan Selatan, 304 hotspots (9,4%) diantaranya berada di dalam dan sekitar konsesi Perkebunan kelapa sawit dengan hotspot terbanyak berada di konsesi PT Surya Langgeng Sejahtera (97), PT Subur Agro Makmur (88), PT Kintap Jaya Wattindo (29), PT Citra Putra Kebun Asri (20), PT Banua Lima Sejurus (19) dan PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri (11).

Dari titik api yang ditemukan di konsesi Perusahaan diatas, PT Surya Langgeng Sejahtera, PT Subur Agro Makmur dan PT Kintap Jaya Wattindo adalah Perusahaan yang terduga terbakar berulang pada tahun sebelumnya yakni 2019, 2023, dan 2026. Ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas tata kelola pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah izin tersebut.

Hotspot tidak hanya ditemukan dalam konsesi perkebunan, tetapi juga di sekitarnya, ini mengindikasikan bahwa tata kelola perkebunan sawit memengaruhi lingkungan sekitarnya. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan menghilangkan fungsi hidrologis alami hutan, mengintersepsi air hujan, mengisi cadangan air tanah, dan menstabilkan debit sungai. Saat musim hujan, hutan menyerap dan menyimpan air sebagai

cadangan untuk musim kemarau. Ketika hutan dikonversi menjadi perkebunan, fungsi hidrologis ini menurun.

Kemudian, Dari enam Perusahaan sawit dengan hotspot terbanyak di konsesinya, tiga Perusahaan yakni PT Subur Agro Makmur, PT Citra Putra Kebun Asri, dan PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri, juga tercatat sebagai pemegang konsesi yang beririsan langsung dengan kawasan Fungsi Ekosistem Gambut, baik FEG Budidaya maupun FEG Lindung, berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.130/2017.

Pola titik api yang terus kembali ke konsesi-konsesi yang sama ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi tutupan lahan Kalimantan Selatan yang kian menyempit akibat beban izin. WALHI Kalsel mencatat bahwa beban izin HGU yang mayoritas perkebunan sawit mencapai seluas 645.612 hektare. Selain itu, Mapbiomas juga mencatat pada 2015-2024, seluas 57.644 hektare hutan di Kalimantan Selatan telah berubah menjadi lahan pertanian, termasuk tutupan lahan sawit yang kini menutupi 627.643 hektare wilayah provinsi Kalimantan Selatan, hal ini menunjukkan skala ekspansi yang konsisten dengan sebaran sekitar 89 izin perkebunan yang terkonsentrasi di Kotabaru, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, wilayah yang juga mencatat tutupan sawit terluas.

Dengan kata lain, luas kawasan yang dibebani izin sudah jauh melampaui luas hutan yang tersisa untuk menopang fungsi ekologis wilayah ini. Setiap hektare tutupan hutan yang berubah menjadi konsesi sawit adalah hektare yang kehilangan kemampuannya menahan air, menyerap panas, dan menjaga kelembapan tanah, kondisi yang justru membuat kawasan bekas hutan dan lahan gambut semakin rentan terbakar begitu memasuki musim kemarau. Inilah yang menjelaskan mengapa hotspot terus muncul berulang di konsesi yang sama: bukan karena hanya faktor kebetulan cuaca, melainkan karena lanskap yang sudah kadung terbuka dan terdegradasi oleh aktivitas perkebunan itu sendiri.

Catatan Kritis WALHI Kalimantan Selatan

WALHI Kalimantan Selatan menyatakan kabut asap yang kian parah bukan semata bencana alam, melainkan akibat salah kelola lingkungan yang sistemik. Data WALHI mencatat lebih dari 51% wilayah Kalsel telah dibebani izin tambang, perkebunan, dan PBPH, belum termasuk aktivitas ilegal yang belum teridentifikasi. Beban eksploitasi ini

telah melampaui daya dukung lingkungan, membuat banjir dan karhutla berulang menjadi konsekuensi logis.

WALHI Kalsel menilai pemerintah selama ini hanya melakukan upaya reaktif menangani bencana tahunan, tanpa menyentuh akar masalah, sementara PAD dari perkebunan dinilai tak sebanding dengan kerugian ekonomi, kesehatan, dan ekologis yang ditanggung masyarakat. Pada akhirnya, rakyatlah yang selalu menanggung beban terberat dari pola investasi ini, baik dalam bentuk kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, maupun terganggunya aktivitas sehari-hari akibat kabut asap yang pekat.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus mengklaim telah menanggulangi kebakaran yang terjadi akibat musim kemarau yang ekstrem. Namun, WALHI Kalsel menilai narasi yang selalu menempatkan cuaca sebagai kambing hitam ini merupakan manuver penghindaran terhadap kewajiban fungsi kontrol, pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum.

Manajer Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan WALHI Kalimantan Selatan, M. Jefry Raharja mengatakan "Ini bukan semata-mata cuaca, tapi ada peran para pemodal atau pemilik usaha yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam yang membuat ekosistem rawa gambut menjadi kering sehingga rawan terbakar," jelasnya.

WALHI Kalsel mempertanyakan mengapa tidak pernah ada pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang membangun sekat pada kanal-kanal atau membuat tanggul di wilayah yang semestinya berfungsi membasahi ekosistem rawa gambut. Praktik rekayasa aliran sungai melalui kanal-kanal buatan dan pemompaan air dalam skala besar untuk membasahi kanal internal perusahaan perkebunan juga dinilai luput dari pengawasan.

"Bayangkan saja, berapa banyak pompa air dengan kapasitas rata-rata 200 liter per detik yang menyedot air sungai untuk membasahi kanal perusahaan. Inilah yang mengakibatkan daerah di luar lahan konsesi mengalami kekeringan dan kebakaran yang cukup hebat," tambah Jefry.

Tuntutan: Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

Atas dasar persoalan tersebut, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan, serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Langkah konkret yang perlu diambil antara lain:

1. Cabut Izin Korporasi yang terbukti melakukan deforestasi dan merusak ekosistem rawa gambut, yang memicu terjadinya bencana ekologis di Kalimantan Selatan.
2. Menghentikan atau moratorium penerbitan izin baru, khususnya untuk industri pertambangan, perkebunan skala besar dan PBPH.
3. Buka data audit kepatuhan lingkungan atas kejahatan korporasi secara transparan kepada publik.
4. Revisi seluruh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi Kalimantan Selatan.
5. Lindungi hutan tropis dan kesatuan ekologis daratan Kalimantan dari ambisi kebijakan dan rencana proyek-proyek ambisius yang mengancam keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Selatan.
6. Pulihkan ruang-ruang hidup masyarakat adat/lokal di Kalimantan Selatan dari ancaman krisis iklim yang disebabkan kebijakan palsu transisi energi yang berdampak pada perempuan dan generasi mendatang.
7. Membuat dan mengimplementasikan peta jalan mitigasi dan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan partisipatif.